

BAB V

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Perkembangan informasi teknologi mendorong pemerintah untuk melaksanakan transformasi pelayanan publik melalui penerapan *e-government*. Salah satunya bentuk implementasi *e-government* di Provinsi DKI Jakarta adalah pengembangan aplikasi alpukat betawi sebagai salah satu media dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi aplikasi alpukat betawi ini bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, melainkan juga melibatkan berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori jaringan tata kelola atau *Governance Network Theory* dari Klijn dan Koppenjan, menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital ini dibentuk melalui jaringan tata kelola yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagai aktor utama dalam implementasi aplikasi alpukat betawi yang memiliki sumber daya kompetensi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki sumber daya produksi, kelurahan yang memiliki sumber daya kompetensi, Gojek yang memiliki sumber daya logistik, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pada aspek strategi pengelolaan jaringan, penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas aplikasi alpukat betawi. Jaringan tata kelola dalam implementasi aplikasi alpukat betawi ini tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat perbedaan kepentingan dan pendapat antara beberapa aktor yang terlibat. Disisi lain, indikator sumber daya dan ketergantungan antar aktor masih kurang dalam mendukung

implementasi aplikasi alpukat betawi terutama pada sumber daya anggaran dan sumber daya produksi seperti kapasitas penyimpanan aplikasi. Oleh karena itu, meskipun aplikasi alpukat betawi telah menunjukkan adanya jaringan tata kelola yang kolaboratif, masih diperlukan adanya peningkatan terhadap sumber daya anggaran dan sumber daya produksi.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, ini maka saran praktis dan saran teoritis sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi aplikasi alpukat betawi dalam perspektif *Governance Network Theory*, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para aktor yang terlibat dalam implementasi aplikasi alpukat betawi, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar aktor melalui forum koordinasi yang lebih formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi alpukat betawi ini melibatkan berbagai aktor yang memiliki sumber daya yang berbeda sehingga diperlukan adanya koordinasi yang lebih formal antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan, Gojek, dan masyarakat. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kapasitas infrastruktur digital dalam jaringan tata kelola seperti peningkatan kapasitas server, pengembangan sistem keamanan siber, dan optimalisasi sistem aplikasi alpukat betawi.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Governance Network Theory* dari Klijn dan Koppenjan untuk menganalisis implementasi aplikasi alpukat betawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori ini menganalisis bagaimana implementasi *e-government* dipengaruhi oleh hubungan antaraktor, distribusi sumber daya, ketergantungan, hingga strategi pengelolaan jaringan. Namun, masih terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan peluang untuk peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis lebih mendalam menggunakan teori *Governance Network Theory* dengan mengkaji bagaimana dinamika kekuasaan dan proses negosiasi antaraktor dalam jaringan implementasi *e-government*. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi aplikasi Alpukat Betawi di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan implementasi layanan administrasi kependudukan di wilayah lainnya. Sehingga pembaca dapat memahami bagaimana pola jaringan tata kelola dalam implementasi *e-government* di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.